

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN  
DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL.

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN  
UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN  
DI KAWASAN KONSERVASI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Kegiatan  
Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi berupa:

FORM A

CONTOH

PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN  
PENGUSAHAAN ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI  
UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT  
(Untuk Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi)

---

---

Nomor : ..... 20.....  
Lampiran : ..... berkas  
Hal : Pernyataan Komitmen Izin Pengelolaan (Pengusahaan Pariwisata Alam  
Perairan di Kawasan Konservasi)

Yth.  
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan/Kantor : .....  
Alamat : .....  
No. KTP : .....  
NPWP : .....  
Nomor HP : .....  
No. Telp/Fax : .....  
Email : .....

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.\*)  
.....  
**NIB:** .....

Dengan ini, menyampaikan persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan  
Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pengusahaan Alam Perairan di Kawasan  
Konservasi) sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,  
Provinsi : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....



FORM B

CONTOH PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT  
(Untuk Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi)

---

---

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan/Kantor : .....  
Alamat : .....  
No. ktp : .....  
NPWP : .....  
Nomor HP : .....  
No. Telp/Faks : .....  
E-mail : .....

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.\*)

.....  
**NIB:** .....

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6.000,00

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

---

\*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

FORM C

PROPOSAL  
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN  
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

(Pelaku Usaha)  
NIB .....

TAHUN  
-----

\*Catatan

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio.

Cover dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KERANGKA DOKUMEN  
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN  
UNTUK PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

- I. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.
  1. Letak Geografis dan Administrasi
    - a. Koordinat Pengambilan Air Laut: .....LU/LS.....BT; dan
    - b. Letak administrasi pengambilan air laut beserta instalasinya:.....

Bagian ini dilengkapi dengan izin lokasi perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi (jika instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat).
  2. Kondisi Hidro-Oseanografi
    - a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;
    - b. arus;
    - c. kecepatan dan arah gelombang;
    - d. pasang surut; dan
    - e. bathimetri.
  3. Kondisi Ekosistem Perairan
    - a. Mangrove;
    - b. terumbu karang;
    - c. padang lamun;
    - d. plankton;
    - e. nekton;
    - f. benthos; dan
    - g. kelimpahan ikan.
  4. Kondisi Sosial Ekonomi
    - a. jumlah penduduk;
    - b. mata pencaharian penduduk;
    - c. pendapatan penduduk per kapita;
    - d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
    - e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.
  5. Pemanfaatan Eksisting Perairan
- II. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Muatan pada dokumen ini disesuaikan dengan jenis pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk ataupun non produk.
  1. Aspek Analisa Kelayakan Usaha
    - a. perhitungan kelayakan usaha;

- b. biaya investasi lahan;
  - c. biaya pembangunan;
  - d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*); dan
  - e. proyeksi perkiraan besaran tarif.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran
  - a. tujuan market;
  - b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
  - c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.
3. Aspek Lingkungan Hidup
  - a. analisa dampak;
  - b. valuasi ekonomi; dan
  - c. simulasi pemodelan numerik untuk *outflow/discharge*.
4. Aspek Teknis dan Teknologi
  - a. kapasitas produksi yang direncanakan;
  - b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
  - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
  - d. biaya produksi.
5. Aspek Sosial dan Ekonomi

Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan air laut selain energi
6. Aspek Pengelolaan
  - a. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan
  - b. Sumber pengadaan tenaga kerja tersebut
7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
  - a. perkiraan biaya operasional;
  - b. biaya O/M;
  - c. biaya depresiasi; dan
  - d. biaya umum dan administrasi.

### III. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

1. Desain tata letak
  - a. skema proses pengambilan air laut (*intake*);
  - b. skema proses pembuangan air laut (*outlet*); dan
  - c. skema proses pengolahan/penggunaan air laut.
2. Kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut
  - a. debit volume penggunaan air laut debit; dan
  - b. debit volume pelepasan air sisa.
3. Rencana aktivitas pasca berakhirnya izin pengelolaan perairan;

4. Rencana pembongkaran;
5. Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan Rencana Struktur Sarana dan Prasana.
6. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan
  - a. RAB untuk konstruksi sarpras pemanfaatan air laut selain energi;
  - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
  - c. operasional dan pemeliharaan; dan
  - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN